

**TESIS**

**IDENTITAS POLITIK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT  
ADAT KAJANG**

Disusun dan diajukan oleh:

**A.UMMU KALTSUM**

**E052 18 1 007**



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**IDENTITAS POLITIK PEREMPUAN DALAM  
MASYARAKAT ADAT KAJANG**

Disusun dan diajukan oleh

**A. UMMU KALTSUM**

E052181007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **15 AGUSTUS 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

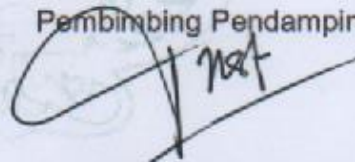
Menyetujui

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**  
Nip. 19710917 199703 1 001

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Gustiana A. Kambo., S.IP., M.Si.**  
Nip. 19730813 199802 2 002

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



**Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.**  
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
Nip. 19750818 200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. UMMU KALTSUM  
NIM : E052181007  
Jurusan : Magister Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



A. UMMU KALTSUM

## KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT, dengan limpahan rahmat dan inayah-Nya sehingga Tesis dengan judul “IDENTITAS POLITIK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ADAT KAJANG”, dapat penulis selesaikan dan *Insyallah* bermanfaat. Salam dan shalawat penulis haturkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai satu-satunya panutan dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyelesaian tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini memerlukan proses dan pengorbanan yang tidaklah sedikit. Berbagai macam hambatan dan kendala penulis bisa rasakan, tapi semua itu dapat dilalui berkat do'a dan dorongan motivasi dari kedua orang tua penulis Ibunda Nurdewi dan Ayahanda Andi Munassar, serta kakak penulis Andi Nurqalbiani dan Ade Dzakwan Awaluddin.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Phil.Sukri, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si selaku dosen penasihat I dan Ibu Dr. Gustiana A Kambo, S.IP., M.Si selaku dosen penasihat II. Beliau merupakan dosen-dosen pembimbing luar biasa dan inspiratif. Beliau telah banyak memberikan arahan, bimbingan, tantangan, dan motivasi hingga tersusunnya tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. H. Rabina Yunus, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, dan Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
4. Pung Hasanuddin dan Etta Andi Endang yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, menjadi rumah kedua bagi penulis selama proses penelitian dan selalu memberi dukungan moril dan materil, Adikku Andi Pangeran Daeng Rewa yang selalu setia menemani selama proses penelitian, serta Adikku Andi Bangsawan.
5. Seluruh dosen dan Staf FISIP Unhas yang memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, nasihat dan pelayanannya selama penulis dalam proses perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin angkatan 2018
7. Arma she, Kak Taufiq, Kak Johan, Asdar, serta Para informan, dan berbagai pihak yang ikut terlibat dalam proses pembuatan tesis ini.

8. Teman-teman yang selalu bertanya “kapan wisuda?”, terima kasih karna berkat pertanyaan tersebut penulis menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga segala bantuan yang diberikan bernilai ibadah dan mendapatkan ridho Allah SWT sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 25 Agustus 2022

A. UMMU KALTSUM

## ABSTRAK

**A. UMMU KALTSUM.** *Politik Identitas Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang* (dibimbing oleh Muhammad dan Gustiana A Kambo)

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis upaya mempertahankan identitas politik perempuan dalam Masyarakat adat Kajang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori feminisme postmodern dengan konsep identitas politik. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara, data sekunder didapat melalui studi pustaka, literatur dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam mempertahankan identitas politik perempuan dalam masyarakat adat Kajang dilihat dari keberadaan *Anrongta* sebagai satu-satunya posisi perempuan dalam menyukseskan pemerintahan dan membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat ada Kajang menggambarkan aktivitas politik perempuan mempertahankan identitasnya dalam konteks politik masyarakat adat. Dalam struktur masyarakat adat Kajang terdapat 2 orang yang menjabat sebagai *Anrongta*. Masing-masing adalah *Anrongta* baku atowayya dan *Anrongta* baku alolowa. Kedua *Anrongta* berperan sebagai penasehat *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang. *Anrongta* Baku Atowayya berperan untuk melantik *Ammatoa* dan menjadi pejabat antar waktu Ketika *Ammatoa* A'linrung (meninggal) hingga *Ammatoa* selanjutnya terpilih. Adapun *Anrongta* Baku Alolowa memiliki tugas yaitu menyiapkan kebutuhan acara ritual adat, memfasilitasi proses pemilihan *Ammatoa* secara alam, membantu atau mendampingi *Anrongta* Baku Atowayya dalam menajalankan tugasnya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh *Ammatoa*. Kedua *Anrongta* juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan dan selalu dilibatkan dalam *A'borong*(musyawara adat). Dari berbagai tugas dan peran *Anrongta* menggambarkan identitas politik perempuan dalam masyarakat adat Kajang.

Kata kunci: Identitas Politik, Perempuan, Kajang, *Anrongta*



## ABSTRACT

A.UMMU KALTSUM. **Political Identity of Women in the Kajang Indigenous Community** (supervised by Muhammad and Gustiana A. Kambo)

This study aims to examine and analyze efforts to maintain the political identity of women in Kajang Indigenous Community. This study uses descriptive qualitative method. The theory used is postmodern feminism theory with the concept of political identity. In this study, primary data came from interview, and secondary data were obtained through literature and documentation study. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The results show that efforts to maintain the political identity of women in Kajang indigenous community are the existence of Anrongta as the only position of women in the success of the government and to assist Ammatoa in leading the community. In the structure of the Kajang indigenous people, there are two people who serve as Anrongta. They are Anrongta Baku Atowayya and Anrongta Baku Alowa, respectively. The two Anrongta acts as an advisor to Ammatoa in leading the Kajang indigenous people. Anrongta Baku Atowayya is the person who plays a role in inaugurating Ammatoa and becomes an interim official when the old Ammatoa A'linrung dies until the next Ammatoa is elected. In the structure of Anrongta Baku Alolowa indigenous community, they have a task of preparing the needs for traditional ritual events, facilitating the natural selection process for Ammatoa, assisting or accompanying Anrongta Baku Atowayya in carrying out his tasks, and performing the tasks assigned by Ammatoa. The two Anrongta also have the right to make decisions and always involve in Alborong. The various tasks and roles played by Anrongta describes the political identity of women in Kajang indigenous community.

Keywords: political identity, woman, Kajang, Anrongta





**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PRAKATA .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	17
1.4. Manfaat Penelitian .....	17
1.5. Definisi dan Istilah .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1. Konsep Identitas Politik.....	27
2.2. Teori Feminisme Postmodern .....	31
2.3. Penelitian Terdahulu .....	39
2.4. Kerangka Pemikiran.....	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	50
3.2. Lokasi Penelitian .....	52
3.3. Jenis dan Sumber data .....	53
3.4. Teknik Penentuan Informan.....	55
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.6. Teknik Analisis Data .....	59
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	62
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	62
4.2. Sejarah Masyarakat Adat Kajang.....	73
4.3. Profil Anrongta Baku Atowayya .....	86
4.4. Profil Anrongta Baku Alolowa .....	88
BAB V PEMBAHASAN .....	91
5.1. Upaya Mempertahankan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang.....	91
5.1.1. <i>Anrongta Baku Atowayya</i> sebagai Identitas Politik Perempuan masyarakat adat Kajang .....	95
5.1.2. <i>Anrongta Baku Alolowa</i> Sebagai Identitas Politik Perempuan Masyarakat Adat Kajang .....	101
5.2. Implikasi Teoritik .....	105

BAB VI.....	112
6.1. Kesimpulan.....	112
6.2. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	114

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Tema masyarakat adat sering kali diabaikan dalam diskursus politik dan demokrasi. Padahal masyarakat adat adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia yang termasuk dalam kelompok yang rentan. Pembahasan secara spesifik mengenai politik dalam masyarakat adat jarang ditemui tanpa menyadari bahwa politik itu sudah ada dalam setiap diri warga negara termasuk masyarakat adat. Permasalahan politik masyarakat adat juga tidak hanya mengenai keterwakilan dan hak pilih semata ataupun permasalahan dalam mempertahankan tanah adat melainkan turut menyeret ruang privat seperti rendahnya partisipasi politik perempuan dan keberadaan perempuan dalam jabatan politik. Kiranya penting melihat representasi politik perempuan dalam masyarakat adat.

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau

kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).<sup>1</sup>

Para ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>2</sup>

Masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat dalam tulisan ini, sebagaimana lazimnya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan mengurus

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108-109.

<sup>2</sup> Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.<sup>3</sup> Di daerah Sulawesi Selatan terdapat beberapa Masyarakat adat salah satunya yaitu, Masyarakat adat Kajang.

Masyarakat adat Kajang merupakan salah satu masyarakat adat dari beberapa kelompok masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Kajang yang dikenal masih memegang tradisi warisan para leluhurnya. Keberadaan masyarakat adat Kajang sebagai lembaga adat dalam suatu komunitas yang masih ada secara eksklusif, tradisional dan unik. Keunikan komunitas adat ini, terletak pada kemampuannya mempertahankan diri dalam suatu ikatan tradisional yang kuat. Seperti pada pakaian yang digunakan, Masyarakat adat Kajang dalam kehidupan sehari-hari hanya menggunakan pakaian dengan warna gelap khususnya warna hitam karena mereka yakini warna hitam lekat dengan makna kesederhanaan sesuai dengan kepercayaan yang mereka yakini selama ini.

Masyarakat adat Kajang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, menganut atau bersandar pada *pasang ri Kajang* (pesan di Kajang). *Pasang* yang dimaksud adalah pesan, amanat, perintah, yang bersifat memaksa dan mengikat

---

<sup>3</sup> Sandra Moniaga, "Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara", Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999. Hlm. Viii.

penganutnya. Oleh karena sifat itulah maka *pasang* ini mempunyai sanksi yang jelas dan tegas terhadap Pelanggaran yang terjadi.<sup>4</sup>

Masyarakat adat Kajang dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang disebut *Ammatoa*. *Ammatoa* berasal dari kata *Amma* yang berarti bapak dan *Toa* yang berarti tua sehingga *Ammatoa* berarti bapak yang dituakan. Namun peranan dan tanggung jawab *Ammatoa* memiliki makna yang lebih dalam artinya. *Ammatoa* bukan saja sebagai pemimpin yang dituakan, akan tetapi juga sebagai pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua masyarakat adat Kajang. *Ammatoa* sebagai pemimpin Masyarakat adat Kajang mempunyai kewenangan/kekuasaan. Dalam kepercayaan adat Kajang *Ammatoa* adalah penghubung dengan *Turi' A'ra'na* yaitu tuhan yang maha kuasa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Pasang Ri Kajang* yang memuat aturan-aturan adat. Kekuasaan *Ammatoa* bukanlah jabatan yang sarat dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi posisi kehormatan yang sarat dengan tanggung jawab untuk melindungi tanah, penduduk, keamanan, hubungan-hubungan sosial, dan sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Abdullah, Hafied Cangara, Mahmud Tang, "*Ammatoa*: Komunitas Tradisional Kajang di Tengah Transformasi Komunikasi dan Informasi", Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 3, No.2 April, 2014, Hal. 104.

<sup>5</sup> Gustiana A Kambo, "Kekuatan Politik Pemangku Adat *Ammatoa* pada Masyarakat Adat di Tanah Toa Bulukumba", Jurnal Noken, Vol. 7 No. 1, 2021, Hal. 91-92.

Masyarakat adat Kajang tinggal dalam Kawasan adat yang bertempat di Desa Tanah Toa terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan adat kajang meliputi dua pembagian wilayah adat yaitu *Ilalang Embaya* dan *Ipantaran Embaya*. Istilah *Ilalang* berarti wilayah bagian dalam dan *Ipantarang* berarti wilayah bagian luar, kata *Emba* sendiri dapat diartikan sebagai kekuasaan. Dapat dipahami *Ilalang Embayya* adalah wilayah yang berada dalam kekuasaan *Ammatoa* sebaliknya *Ipantarang Embayya* adalah wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*.

Masyarakat kajang berada dalam Kawasan adat tapi pada umumnya telah mengalami proses perkembangan seiring dengan gerak pembangunan yang dijalankan pemerintah, namun Masyarakat adat kajang relatif kurang memperlihatkan perkembangan seperti kemajuan teknologi. Bukan karena pemerintah mengabaikannya, melainkan karena mereka tetap teguh mempertahankan adat istiadat dan tatanan kemasyarakatan yang diatur dalam aturan tak tertulis yang disebut *pasang*.<sup>6</sup> Melalui penerapan *pasang* hingga hari ini, masyarakat adat kajang mampu menyaring pengaruh dari luar yang masuk ke wilayah mereka. Sikap *kamase-masea* yang bermakna kesederhanaan dijadikan sebagai

---

<sup>6</sup>Abdul Hafid, *Ammatoa* dalam Kelembagaan Komunitas Adat kajang. (Makassar: De Lamacca, 2015) Hal. 4-5.



tolak ukur keduniaan dari kepercayaan *pasang* yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini membuat mereka benar-benar membatasi penggunaan teknologi yang masuk ke dalam Kawasan adat. Dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat adat Kajang juga masih menggunakan pakaian berwarna hitam yang mereka yakini lekat dengan makna kesederhanaan hingga saat ini.

Masyarakat adat Kajang terkesan tertutup namun sebenarnya masih sangat dinamis dengan budaya sendiri. Hubungan masyarakat adat dengan masyarakat luar telah terjalin sejak dulu. Intensitas hubungan dengan dunia luar bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Arus modernisasi dan pesatnya pembangunan justru membuat interaksi mereka dengan masyarakat luar kawasan semakin meningkat tanpa mengabaikan atau meninggal nilai-nilai sosial budayanya. Salah satu bentuk negosiasi yang akhirnya dilakukan oleh masyarakat adat kajang terhadap perkembangan zaman adalah satu per satu masyarakat adat kajang menyekolahkan anaknya ke sekolah formal disekitar Kawasan adat.<sup>7</sup>

Anak-anak usia pelajar yang berada didalam Kawasan adat juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan

---

<sup>7</sup> Ayu Adriani, Partini, Muhammad Sulhan, "Negosiasi Identitas masyarakat adat *Ammatoa* terhadap system Pendidikan modern", Jurnal Komunikasi, Vol. XIII No.01, Maret 2019, Hal. 85.

yang lebih tinggi.<sup>8</sup> Seperti Ramlah salah satu anak perempuan *Ammatoa* yang melanjutkan pendidikannya hingga ke tingkat universitas. Kemudian, adanya peraturan yang mengatur tentang Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa harus memenuhi persyaratan umum salah satunya yaitu, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat serta persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.<sup>9</sup>

Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan pengangkatan Ramlah sebagai Kepala Dusun Benteng di Desa Tanah Toa. Tingkat pendidikan yang terbilang tinggi dan merupakan penduduk asli kawasan adat Kajang menjadikan Ramlah diangkat sebagai kepala dusun. kemudian pada tahun 2019 Ramlah mencalonkan diri sebagai salah satu caleg dari Partai PKS walaupun tidak terpilih namun hal ini menunjukkan Perempuan juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan Masyarakat adat Kajang dan hingga saat ini hubungan masyarakat adat kajang dengan dunia luar terus mengalami peningkatan dan terjalin dengan dinamis.

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3)

Perempuan masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang sangat mulia, karena perempuanlah yang melantik *Ammatoa* (pemimpin adat) yang disebut sebagai *Anrongta*. Selain itu, dalam mengurus atau memimpin masyarakat adat Kajang *Ammatoa* dibantu oleh beberapa pejabatnya yang disebut dengan *Gallarang* yang bekerja terstruktur berdasarkan bidang tugas masing-masing. Adapun tugas dan peranan dari *Gallarang* seperti yang akan diuraikan satu persatu :

1. *Galla' Pantama* yang bertugas dibidang pertanian dalam menentukan strategi pertanian.
2. *Galla' Kajang* yang bertugas sebagai pemimpin ritual adat dan menangani penghinaan terhadap *pasang*.
3. *Galla' Lombo'* yang bertugas sebagai penghubung *Ammatoa* dengan pihak luar yang merupakan Kepala Desa Tanah Toa.
4. *Galla' Puto* yang bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa*.
5. *Galla' Malle'leng* yang bertugas dibidang perikanan dan kelautan.
6. *Karaeng La'biria ri Kajang* merupakan bagian dari *Karaeng Tallua* bertugas sebagai Camat Kecamatan Kajang.
7. *Galla' Sulehatang* merupakan bagian dari *Karaeng Tallua* bertugas menangani perkara penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bersuami, perampokan atau

- pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah. *Galla Sulehatang* sebagai penyiar berita atau informasi dari *Ammatoa*.
8. *Moncong Buloa* merupakan bagian dari *Karaeng Tallua* yang memiliki tugas pokok menangani perkara penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bersuami, perampokan atau pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah.
  9. *Anrong Guru* bertugas dibidang pertahanan dan keamanan diseluruh wilayah adat dan menjadi panglima tempur atau panglima perang (*Pammusu*).
  10. *Galla' Anjuru'* yang bertugas bersama dengan *Sanro Kajang* mengurus acara yang diadakan oleh *Amma Toa*.
  11. *Lompo Ada'* yang bertugas sebagai penghubung atau penyampaian pesan *Ammatoa* kepada *Ada' Lima* yang merupakan lima orang *Gallarang* Lainnya, yaitu : *Galla Pantama*, *Galla Lombo*, *Galla Kajang*, *Galla Puto*, dan *Galla Malle'leng*.
  12. *Lompo Karaeng* yang bertugas sebagai Penyambung Informasi *Ammatoa* kepada *karaeng Tallua* yang merupakan tiga orang *Gallarang* lainnya, yaitu: *Karaeng Kajang*, *Sulehatang*, dan *Moncong Buloa*.
  13. *Kadahaya* yang bertugas mempersiapkan kebutuhan *Ammatoa* dalam melakukan ritual adat, pembawa bendera.

14. *Kali* yang bertugas sebagai pembaca doa pada saat pesta adat dan sebagai penghulu untuk pernikahan.
15. *Galla' Sangkala'* yang bertugas mengambil dan membawa sayur serta bumbu dapur pada saat acara adat,
16. *Galla' Ganta* yang bertugas membawa bambu pada saat acara adat.
17. *Galla Sapaya* yang bertugas mengawasi dan memelihara hutan adat di .
18. *Galla' Bantalang* yang bertugas menjaga dan membawa udang pada saat acara Adat.
19. *Loha Karaeng* sebagai penghargaan karena telah menjadi karaeng dengan baik dalam waktu yang cukup lama serta bertugas bersama *Galla Ganta, Galla Sangkala, Galla Sapaya, dan Galla Bantalang* membantu *Karaeng Tallua* melaksanakan tugasnya yang disebut *Appa' solo ri Karaengia* (ada empat perkara yang ditangani langsung oleh *Karaeng Tallua*) yaitu: *Tuttu', Lahan, Rappa, Tunu Bola* (penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, perampokan atau pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah).
20. *Tutoa Sangkala* yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh *Ammatoa*)
21. *Tutoa Ganta* yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh *Ammatoa*).

22. Karaeng Pattongko yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh *Ammatoa*).
23. *Galla' Jojjolo'* yang bertugas sebagai Juru Petunjuk.
24. *Sanro Kajang* yang bertugas memohon doa pada sang pencipta agar masyarakat Kajang dijauhkan dari malapetaka dan sebagai seseorang yang tahu akan hidayat atau apa yang akan terjadi kedepannya.
25. *Kammula ada'* yang bertugas untuk memulai segala sesuatu pembicaraan saat acara adat.
26. *Panrea bassi ada'* yang bertugas sebagai orang yang menempa besi dan keris.

Dalam struktur pemerintahannya *Ammatoa* dibantu oleh pemangku adat yang telah diuraikan sebelumnya yaitu, 26 *Gallarang* diluar dari struktur tersebut *Ammatoa* juga dibantu oleh 2 orang perempuan yang disebut *Anrongta*. Berbeda dengan *Gallarang* yang dijabat oleh laki-laki *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh 2 perempuan saja yaitu, masing-masing *Anrongta baku atowayya* dan *Anrongta baku alolowa*. Meskipun dalam persentase jumlah yang sedikit yaitu 2 orang dibandingkan dengan *Gallarang*, *Anrongta* adalah perempuan yang memiliki peran penting dalam struktur adat kajang.

*Anrong* sendiri secara harfiah berarti ibu jadi *Anrongta* dapat di artikan sebagai Ibu bagi masyarakat adat Kajang. *Anrongta*

berperan sebagai penasehat *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang. *Anrongta* memiliki tugas untuk memfasilitasi proses pemilihan *Ammatoa* secara alam, melantik *Ammatoa*, juga menjadi pejabat antar waktu pada saat *Ammatoa allinrung* (meninggal) hingga *Ammatoa* selanjutnya terpilih, selain itu *Anrongta* juga bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat. *Anrongta* juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan karena selalu dilibatkan dalam proses *A'borong* (musyawarah adat).

*Anrongta* sering dimintai saran (*patangara*), dalam rapat pelanggaran adat atau acara ritual adat. Begitupun dengan *Anrongta*, selalu menerima masukan (*patangara*) dari *Ammatoa* di setiap persiapan kegiatan adat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara adat. Setiap pelaksanaan musyawarah adat (*a'borong*) di rumah *Ammatoa*, terlebih dahulu dikoordinasikan ke *Anrongta* baik *Ammatoa* sendiri atau perwakilan *Ammatoa*. Koordinasi *Ammatoa* dan *Anrongta* biasa dilaksanakan setiap bulan atau tergantung waktu kegiatan adat yang akan dilaksanakan.

Pengangkatan *Anrongta* ditunjuk langsung oleh *Ammatoa*. Setelah *Anrongta* sebelumnya meninggal kemudian *Anrongta* baru diangkat. Syarat dalam pengangkatan *Anrongta* yaitu perempuan, memiliki garis keturunan *Anrongta*, sudah menikah, taat dan patuh pada *pasang ri kajang* karena *Anrongta* dipilih berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan *pasang* dan harus mengetahui

serta memahami acara atau ritual adat seperti *panganro*, *Andingingi* serta acara adat lainnya dan tinggal di *Rambang Sempang* atau lingkungan masyarakat adat Kajang.

Dalam menjalankan tugas sebagai *Anrongta* juga tetap memiliki peran seperti perempuan adat lainnya yang disibukkan dengan menyiapkan kebutuhan acara ritual adat Kajang, seperti daun siri, buah pinang, kelapa, beras, ayam dan kebutuhan lainnya dalam acara adat. Berbagai macam kebutuhan dalam acara adat dikumpulkan dari masyarakat kecuali beras disiapkan langsung oleh *Ammatoa* dan *Anrongta*. Salah satu acara ritual adat kajang berupa *pangandro* dan *andingingi* dilaksanakan di kawasan hutan. *Andingingi* bertujuan untuk meminta hujan sedangkan *Pangandro* dilaksanakan pada saat pergantian musim sebagai acara tolak bala atau terhindar dari berbagai jenis penyakit. Acara tersebut dilaksanakan dalam kawasan hutan dengan sakral.

Berbagai tugas dan peranan *Anrongta* yang telah disebutkan diatas adalah bentuk persentase perempuan dalam struktur pemerintahan Masyarakat adat Kajang. Berbeda dengan *Gallarang* yang dijabat oleh laki-laki *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh 2 perempuan saja yaitu, masing-masing *Anrongta baku atowayya* dan *Anrongta baku alolowa*. Meskipun dalam persentase jumlah yang lebih sedikit yaitu 2 orang dibandingkan dengan *Gallarang yang dijabat oleh 26 orang*, *Anrongta* adalah perempuan



yang memiliki peran penting sebagai perwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan Masyarakat adat Kajang.

Pentingnya posisi perempuan dalam Masyarakat adat Kajang yang sudah lebih dulu menerapkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahannya menggambarkan posisi yang penting dalam kelembagaan adat. Masyarakat adat Kajang sudah lebih dulu memberikan ruang untuk keterwakilan perempuan dalam pemerintahannya, Seperti dalam Kebijakan *affirmative action* yang menempatkan kuota 30% bagi kaum perempuan yang merupakan awal dari pengarusutamaan keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia. Selain itu perempuan memberikan warna dalam proses politik yang sedang berjalan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi di Lembaga legislatif, merupakan kunci keterlibatan perempuan masuk dalam ranah politik.<sup>10</sup>

Dalam struktur pemerintahan *Ammatoa*, peneguhan tentang identitas perempuan sebagai penyelenggara pemerintahan masyarakat adat Kajang layak menjadi salah satu isu yang dikembangkan. Keberadaan *Anrongta* sebagai satu-satunya jabatan perempuan yang berpartisipasi dalam menyukseskan pemerintahan

---

<sup>10</sup> Gustiana A kambo, Penguatan identitas perempuan dalam pemilihan kepala daerah, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 3 No.1, The Politics, 2017, hal. 3.

dan membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang menggambarkan aktivitas politik perempuan mempertahankan identitasnya dalam konteks politik masyarakat adat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang identitas politik perempuan dalam masyarakat adat. Adapun judul penelitian secara lengkap adalah “Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Keberadaan *Anrongta* dalam struktur kelembagaan Masyarakat adat Kajang yang merupakan satu-satunya jabatan perempuan yang berpartisipasi dalam menyukseskan pemerintahan dan membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang menggambarkan aktivitas politik perempuan mempertahankan identitasnya dalam konteks politik masyarakat adat.

Berbeda dengan *Gallarang* yang dijabat oleh laki-laki berjumlah 26 orang pejabat, *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh 2 perempuan saja yaitu, masing-masing *Anrongta baku atowayya* dan *Anrongta baku alolowa*. Meskipun dalam persentase jumlah yang lebih sedikit yaitu 2 orang dibandingkan dengan *Gallarang yang dijabat oleh 26 orang*, *Anrongta* adalah perempuan yang memiliki peranan penting sebagai perwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan Masyarakat adat Kajang.

*Anrongta* sebagai upaya dalam mempertahankan identitas politik perempuan dalam Masyarakat adat Kajang dilihat dari bagaimana *Anrongta* memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya membantu *Ammatoa* dalam pelaksanaan pemerintahan Masyarakat adat Kajang. upaya dalam mempertahankan identitas politik perempuan tidak dilihat dari bagaimana mereka bersaing dengan pejabat adat yang lain untuk memperebutkan kekuasaan atau menambah kuota dalam struktur kelembagaan pemerintahan adat, tetapi bagaimana *Anrongta* memaksimalkan peranan dan tanggung jawabnya sebagai perempuan dalam memimpin masyarakat adat Kajang.

*Anrongta* sebagai pejabat pemerintahan adat membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang. *Anrongta* memiliki tugas yaitu, memfasilitasi proses pemilihan *Ammatoa* secara alam, melantik *Ammatoa*, *Anrongta* juga menjadi pejabat antar waktu pada saat *Ammatoa Allinrung* (meninggal) sampai *Ammatoa* baru terpilih, selain itu *Anrongta* juga bertugas mempersiapkan kebutuhan acara ritual adat yang akan dilaksanakan dalam Masyarakat adat Kajang. Maka hal tersebut perlu mendapat perhatian serta penting untuk diidentifikasi. Bagaimana identitas perempuan masyarakat adat dalam dinamika kelembagaan masyarakat adat Kajang. Dasar pemikiran inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian tentang identitas politik

perempuan dalam masyarakat adat Kajang dengan fokus permasalahan:

Bagaimana upaya dalam mempertahankan identitas politik perempuan masyarakat adat kajang?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: untuk mengkaji dan menganalisis upaya mempertahankan identitas politik perempuan dalam Masyarakat adat kajang.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik dalam segi akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memperkaya literatur dan memberi manfaat teoritik pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik terkait identitas politik khususnya identitas politik perempuan masyarakat adat Kajang dan dapat memberi manfaat teoritik dalam pengembangan kajian identitas politik. Seperti diketahui bahwa Penelitian yang bertemakan seperti ini masih kurang di Indonesia. Sehingga penelitian tersebut dapat menjadi

refrensi bagi siapa saja yang berminat dan mengetahui tentang identitas politik perempuan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Kajang.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan atau informasi politik dan budaya terutama dikalangan akademisi, para peneliti, pemerhati dalam kelembagaan adat dan para ilmuwan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan manfaat praktisi berguna bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya Kecamatan Kajang maupun pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kelembagaan komunitas Masyarakat adat Kajang, maupun dalam pengambilan kebijakan terhadap keterwakilan perempuan dalam pemerintahan atau jabatan politik, seperti dalam kebijakan *Affirmative action*.

#### 1.5. Definisi dan Istilah

Bagian ini berisi tentang definisi dan Istilah agar tidak menimbulkan salah tafsir. Maka istilah atau kata itu perlu diberi definisi atau Batasan pengertian.

*Abborong* : Musyawarah Adat

*Allinrung* : Meninggal

*Ammatoa* : Pemimpin Masyarakat adat Kajang yang mempunyai kewenangan/kekuasaan, *Ammatoa* berarti bapak

yang dituakan. Peranan dan tanggung jawabnya juga sebagai pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua masyarakat adat Kajang. Penghubung dengan tuhan yang maha kuasa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Pasang Ri Kajang* yang memuat aturan-aturan adat.

*Amma* : Bapak

*Toa* : Tua

*Pangganro* : Salah satu ritual adat Kajang yang dilaksanakan pada saat pergantian musim sebagai acara tolak bala atau terhindar dari berbagai jenis penyakit.

*Andingingi* : Pendinginan atau Salah satu ritual adat Kajang yang dilaksanakan untuk meminta hujan

*Anrong* : Ibu, Mama, Orang Tua Perempuan

*Anrongta* : Ibu bagi Masyarakat Adat Kajang, Pemimpin perempuan bagi masyarakat adat Kajang, Penasehat *Ammatoa*.

*Anrongta Baku Alolowa*: *Anrongta* yang muda, *Anrongta Baku alolowa* bertugas untuk mendampingi dan membantu *Anrongta Baku Atowayya* dalam menjalankan tugasnya, dan melaksanakan jika diberi tugas khusus dari *Ammatoa*.

*Anrongta Baku Atowayya*: Anrongta yang tua, *Anrongta Baku Atowayya* merupakan orang yang berperan untuk melantik *Ammatoa*, pejabat antar waktu pada saat *ammatoa* meninggal sampai ada *ammatoa* baru. Anrongta baku atowayya juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan dan selalu dilibatkan dalam musyawarah adat.

*Embayya*: Kekuasaan.

*Gallarang*: Pemangku adat, Pejabat dalam pemerintahan masyarakat adat Kajang yang hanya bisa dijabat oleh laki-laki, bekerja terstruktur berdasarkan bidang tugas masing-masing.

*Ilalang Embayya*: Wilayah yang berada dalam kekuasaan *Ammatoa*.

*Ipantarang Embayya*: Wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*.

Kajang: Salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama salah satu suku atau masyarakat adat.

*Kalomba*: salah satu prosesi adat yang diperuntukkan bagi anak-anak suku kajang dengan tujuan untuk menghilangkan sial dan penyakit turunan dari leluhurnya

*Kamase-masea*: Prinsip hidup masyarakat adat Kajang yang bermakna kesederhanaan.

*Tope*: Sarung hitam yang ditenun oleh masyarakat adat Kajang.

*Garusu'*: proses melumuri sarung dengan menggunakan pewarna dari tumbuh-tumbuhan tertentu.

*Konjo*: Bahasa yang digunakan Masyarakat adat Kajang dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan salah satu dialek dari Bahasa Makassar namun memiliki perbedaan, baik dalam pengucapan maupun kosa katanya.

*Mabbattasa Jera*: Membersihkan kuburan yang ada di dalam Kawasan adat.

*Maddangang* : *acara memperingati hari kematian seseorang masyarakat adat Kajang yang meninggal.*

*Makkattere* : pesta adat dalam bentuk ritual pemotongan rambut yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kajang yang mampu dan masih dari keturunan Kajang, serta taat terhadap Pasang Ri Kajang.

*Pasang* : Pesan

*Pasang ri Kajang*: pesan di Kajang, memuat aturan-aturan adat, amanat, perintah, yang bersifat memaksa dan



mengikat masyarakat adat Kajang, mempunyai sanksi yang jelas dan tegas terhadap Pelanggaran yang terjadi.

*Passapu* : *Ikat kepala.*

*Patangarra* : Nasihat, masukan.

*Rambang Sempang*: lingkungan masyarakat adat Kajang.

*Tanah Towa* : Tanah tertua, lokasi masyarakat adat Kajang.

*Tau Manurung*: Asal-usul orang Kajang yang keluar dari seruas bambu, Bernama Batara Daeng Rilangi yang dikawini Pu' Tampang Daeng Malowang.

*Pettong* : Bambu

*Tombolo* : *Bukit yang menyerupai tempurung kelapa*

*Tumariolo* : *Manusia Terdahulu*

*Turi' A'ra'na* : Kata *Turi' A'ra'na* berasal dari Bahasa Konjo, yang berarti Tuhan yang maha esa

*Galla' Pantama*: Pemangku adat yang bertugas dibidang pertanian dalam menentukan strategi pertanian.

*Galla' Kajang* : Sebagai pemimpin ritual adat dan menangani penghinaan terhadap *pasang*.

*Galla' Lombo'* : Bertugas sebagai penghubung *Ammatoa* dengan pihak luar yang merupakan Kepala Desa Tanah Toa.

*Galla' Puto*: Pemangku adat yang bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa*.

*Galla' Malle'leng*: bertugas dibidang perikanan dan kelautan.

*Karaeng La'biria ri Kajang*: bagian dari *Karaeng Tallua* bertugas sebagai Camat Kecamatan Kajang.

*Galla' Sulehatang*: bagian dari *Karaeng Tallua* bertugas menangani perkara penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bersuami, perampokan atau pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah. *Galla Sulehatang* sebagai penyiar berita atau informasi dari *Ammatoa*.

*Moncong Buloa*: bagian dari *Karaeng Tallua* yang memiliki tugas pokok menangani perkara penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang bersuami, perampokan atau pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah.

*Anrong Guru*: Pejabat Adat yang bertugas dibidang pertahanan dan keamanan diseluruh wilayah adat dan menjadi panglima tempur atau panglima perang.

*Pammusu*: Panglima perang.

*Galla' Anjuru'*: Pejabat yang bertugas bersama dengan *Sanro Kajang* mengurus acara yang diadakan oleh Amma Toa.

*Lompo Ada'*: Penghubung atau penyampaian pesan *Ammatoa* kepada *Ada' Lima* yang merupakan lima orang *Gallarang* Lainnya, yaitu : *Galla Pantama, Galla Lombo, Galla Kajang, Galla Puto,* dan *Galla Malle'leng.*

*Lompo Karaeng*: Penyambung Informasi *Ammatoa* kepada karaeng Tallua yang merupakan tiga orang *Gallarang* lainnya, yaitu: *Karaeng Kajang, Sulehatang,* dan *Moncong Buloa.*

*Kadahaya*: *Pemangku adat* yang bertugas mempersiapkan kebutuhan *Ammatoa* dalam melakukan ritual adat, pembawa bendera.

*Kali*: Pembaca doa pada saat pesta adat dan sebagai penghulu untuk pernikahan.

*Galla' Sangkala'*: *Pemangku adat* yang bertugas mengambil dan membawa sayur serta bumbu dapur pada saat acara adat.

*Galla' Ganta*: Pembawa bambu pada saat acara adat.

*Galla Sapaya*: *Pemangku adat* yang bertugas mengawasi dan memelihara hutan adat.

*Galla' Bantalang*: Pemangku adat yang bertugas menjaga dan membawa udang pada saat acara Adat.

*Loha Karaeng*: Penghargaan karena telah menjadi karaeng dengan baik dalam waktu yang cukup lama serta bertugas bersama *Galla Ganta*, *Galla Sangkala*, *Galla Sapaya*, dan *Galla Bantalang* membantu *Karaeng Tallua* melaksanakan tugasnya yang disebut *Appa' solo ri Karaengia* (ada empat perkara yang ditangani langsung oleh *Karaeng Tallua*) yaitu: *Tuttu'*, *Lahan*, *Rappa*, *Tunu Bola* (penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, perampokan atau pencurian, pengrusakan hingga pembakaran rumah).

*Tutoa Sangkala*: Pemangku adat yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh *Ammatoa*)

*Tutoa Ganta*: Pemangku adat yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh *Ammatoa*).

*Karaeng Pattongko*: Pemangku adat yang bertugas menyelesaikan perkara di wilayahnya (diangkat dan diberi kewenangan oleh *Ammatoa*).

*Galla' Jojjolo'*: Pemangku adat yang bertugas sebagai Juru Petunjuk.

*Sanro Kajang*: Pemangku adat yang bertugas memohon doa pada sang pencipta agar masyarakat Kajang dijauhkan dari malapetaka dan sebagai seseorang yang tahu akan hidayat atau apa yang akan terjadi kedepannya.

*Kammula ada'*: bertugas untuk memulai segala sesuatu pembicaraan saat acara adat.

*Panrea bassi ada'* : Pemangku adat yang menempa besi dan keris.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep atau teori yang dijadikan dasar terkait masalah penelitian yaitu, mengenai konsep identitas politik dan teori feminisme post modern. Konsep atau teori diharapkan dapat menganalisis dan menginterpretasi masalah dan data yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 2.1. Konsep Identitas Politik

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.<sup>11</sup> Secara epistemologi, kata identitas berasal dari kata *identity*, yang berarti kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain. Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik; kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain.<sup>12</sup>

Studi identitas menjadi bagian dalam melakukan interaksi-interaksi sosial, baik dalam masyarakat heterogen maupun homogen. Dalam masyarakat yang heterogen jarang ditemukan

---

<sup>11</sup>Identitas (Def. 1) (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/identitas>, 19 Maret 2021

<sup>12</sup> Jabal Tarik Ibrahim, Sosiologi Pedesaan (Malang: UMM Press, 2003), 64.

adanya identitas tunggal. Akan tetapi, biasanya orang-orang mengidentifikasi diri mereka dengan nilai-nilai dari berbagai kelompok yang berbeda. Hal itu mengilhami beberapa pemikir yang mendalami kajian identitas.

Studi identitas pada kenyataannya tidak didefinisikan sebagai suatu yang tunggal, homogen dan permanen. Identitas merupakan pemahaman yang melibatkan individu dan kelompok dalam suatu situasional atas keberadaannya. Dalam hal ini, Giddens mengkonstruksi sebagai *multiple identity* yang melibatkan pemahaman dasar atas tingginya etos “kepemenuhan/pemenuhan diri” (*self fulfillment*) serta “aktualisasi diri” (*self actualisation*). Apa yang disebutkannya bertitiktolak pada proses strukturasi modernitas yang menerobos ke ranah hidup pribadi. Bagi Giddens, diri (*self*) tidak hanya menjadi penentuan tradisi komunitas lokal, lebih dari itu, identitas diri menjadi proyek yang refleksif. Artinya, keseluruhan cara hidup dan narasi diri kita semakin berlangsung dalam rimba pilihan yang disaring lewat sistem abstrak dan dialektika antara apa yang lokal dan yang global.

Dengan demikian proses ganda ‘menglobal dan melokal (mempersonal)’ dalam konstruksi identitas diri sebagai proyek refleksif merupakan elementer refleksif modernitas. Individu harus menemukan identitasnya dalam strategi-strategi dan pilihan-pilihan yang disediakan oleh sistem-sistem abstrak. Sedangkan aktualisasi

diri yang dibangun dari kepercayaan dasar dalam konteks personalis hanya dapat dibangun oleh pengeluaran diri pada yang lain.

Sementara itu studi identitas pada dasarnya, melihat karakter individu yang tercermin sejak lahir sebagai suatu anugerah dari sang pencipta. Hal ini merupakan identitas dasar dan kemudian membentuk “keakuan” dan membedakannya dengan yang lain (kamu, mereka, dan dia). Terkait dengan pemikiran tersebut, Jary mengasumsikan bahwa identitas adalah jati diri yang terkait dengan perasaan diri, yaitu rasa diri yang berkembang selama masa pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, yang dapat membedakan segala perilakunya dengan orang tua, keluarga dan masyarakat dimana ia berada. Dalam hal ini identitas lebih berorientasi pada kesadaran pada diri sendiri (siapa mereka/aku), apa yang paling baik dan berarti baginya serta apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dirinya.

Selanjutnya, identitas tidak hanya dapat dilihat dari impresi kedirian kita sendiri tetapi juga berasal dari impresi diri dari orang lain, serta impresi orang lain tentang kita. Menurutnya, ada dua hal penting dalam menilai identitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal yang disebut pertama, sebagai faktor internal identitas terlahir dari apa yang terpikirkan tentang identitas kita, sedang dalam hal kedua, yakni identitas eksternal dapat diidentifikasi bagaimana orang lain melihat dan beraksi terhadap



diri kita. Hal itu dapat menjadi sebuah pertentangan atau dapat mendukung dan memperkuat pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Artinya bahwa, munculnya identitas berasal dari hubungan antara diri kita dengan orang lain. Dengan demikian identitas dibentuk dan ditata dalam hubungan dialektik antara faktor internal dan faktor eksternal, dan hasil dari interaksi keduanya dapat menghasilkan identitas diri.<sup>13</sup>

Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka.<sup>14</sup> Ini adalah definisi umum yang sederhana mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan berikutnya mengenai identitas politik.

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan

---

<sup>13</sup> Gustiana A Kambo, Penguatan Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No.1, Januari 2017. Hlm.6.

<sup>14</sup> Titik Widyanti, *Politik Sulbarter: Pergulatan Identitas Waria* (Yogyakarta:UGM, 2009), hal. 13.

sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu perbedaan (*sense of otherness*).<sup>15</sup>

Secara konsep identitas politik dengan politik identitas berbeda. Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.<sup>16</sup>

Identitas Politik di dalam konteks poskolonial berkenaan dengan representasi subjek atau kesadaran seseorang yang dikonstruksi oleh berbagai aspek didalam relasi sosial, misalnya seperti; kelas, gender, ras, seksualitas dan etnisitas.

## 2.2. Teori Feminisme Postmodern

Pembahasan mengenai keterwakilan perempuan dalam ranah politik, sangat identik dengan kajian identitas gender. Makna tentang kesetaraan gender berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesederajatan manusia. Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan

---

<sup>15</sup> Arie Setyaningrum, Memetakan Lokasi bagi 'politik identitas dalam wacana politik poskolonial. *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan* Edisi 2 Tahun 2005

<sup>16</sup> Ibid, 24.

derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia.<sup>17</sup>

Gender dapat diartikan sebagai peran dan tanggung jawab yang dikonseptualisasikan secara sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu yang didukung oleh struktur masyarakat yang bersangkutan.<sup>18</sup> Gender seringkali disamakan dengan pengertian sex (jenis kelamin). Padahal istilah gender lebih merujuk pada penggambaran peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender ini menggambarkan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di masyarakat.<sup>19</sup>

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah:

---

<sup>17</sup> Gustiana A Kambo, Penguatan Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No.1, Januari 2017. Hlm.6.

<sup>18</sup>Rabina Yunus, Eri Iswary, Firman Saleh, Utami, Fakhira Y (2020) Language and Gender Reconciliation in Karampuang Ethnic Community of Sinjai District, South Sulawesi. In: *BASA 2019*, 20-21 September 2019, Surakarta, Central Java, Indonesia. Hlm. 3.

<sup>19</sup> Rabina Yunus, Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutamaan Gender (Analisis SWOT pada Program Gender Watch di Kabupaten Gresik), *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e-JKPP)*, Vol 1, No 2, 2015. Hlm. 82-83

1. Akses, yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan.
2. Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat, pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pemaknaan kesetaraan gender dalam pengertian yang umum tersebut berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Dalam sudut pandang psikologi, perempuan dan laki-laki dibedakan berdasarkan fisiknya yang merupakan kodrat dan tidak mampu untuk dipertukarkan. Dalam sudut pandang psikologi, perempuan dan laki-laki dibedakan berdasarkan konstruksi sosial dimana peran-peran dijalankan masing-masing bisa saja dipertukarkan atau dalam artian peran yang sifatnya tidak kodrati.<sup>20</sup>

laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keduanya memiliki hak yang setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara

---

<sup>20</sup> Rabina Yunus, Analisis Gender terhadap Fenomena Sosial, (Makassar: Humanities Genius, 2022). hlm. 20.

perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang keduanya lakukan. Dominasi laki-laki dalam struktur kelembagaan pemerintahan semakin memberikan peluang yang besar kepada laki-laki untuk menciptakan tatanan politik yang bias gender, karena dominasi satu jenis seringkali melahirkan kebijakan yang bias.

Kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh kesempatan dan alokasi sumber daya, manfaat atau dalam mengakses pelayanan. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.

secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. cukup banyak teori yang dikembangkan para

ahli, terutama kaum feminisme untuk memperbincangkan masalah gender.<sup>21</sup>

Dalam mendefinisikan feminisme, para feminis memiliki pendapat yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan feminisme tidak didefinisikan berdasarkan konsep dan rumusan teori yang tunggal, karena itu dalam mendefinisikan feminisme masing-masing feminis memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan realitas yang melatarbelakanginya, tingkat kesadaran, persepsi, serta Tindakan yang dilakukan feminisme itu sendiri.<sup>22</sup>

Istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa latin *femmina* yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa didunia. Dalam bahasa Perancis yang digunakan kata *femme* untuk menyebut perempuan. Finitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah *male* (laki-laki) dan *female* (perempuan) dalam arti biologis (sex/jenis kelamin). Dalam hal ini istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminim, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminim.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid. 5.

<sup>22</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Hal. 40.

<sup>23</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) suatu tinjauan Filsafat Moral* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), Hal. 60.

Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi karena setiap Gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan,<sup>24</sup> namun jika dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.<sup>25</sup>

William Outwaite, mendefinisikan feminisme sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria (patriarki), ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin.<sup>26</sup> Sedangkan Nicholas Abercrombie dkk. berpendapat feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern, feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Barat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Anggie Natalia Paramitha, *Unsur Feminisme* (Jakarta: FIB UI, 2009) Hal. 158.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 241.

<sup>26</sup> William Outwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, Terj. Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) Hal. 313.

<sup>27</sup> Nicholas Abercrombie dkk., *Kamus sosiologi*, terj. Desi Noviyani dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 202.

Dalam Penelitian ini digunakan teori feminisme postmodern untuk menginterpretasi identitas politik perempuan dalam masyarakat adat Kajang. Feminisme postmodern yang terpengaruh oleh pandangan aliran filsafat modern seperti eksistensialisme, psikoanalisis, dan dekonstruksi.

Tinjauan utama feminisme postmodern adalah pada teks di mana realitas dipandang sebagai text/intertextual baik yang berupa tipe lisan, tulisan, maupun imaji (gambar). Dengan kata lain, aliran ini berpandangan bahwa dominasi laki-laki dan cara berpikirnya diproduksi dalam bahasa laki-laki. Mereka pada dasarnya menerima perbedaan laki-laki dan perempuan. Namun perwujudan dominasi yang terlanjur berada di tangan laki-laki perlu direkonstruksi melalui pembongkaran narasi-narasi, realitas, konsep kebenaran, dan bahasa yang diterima dan dikembangkan di dalam masyarakat. Mereka menganggap bahwa tiap masyarakat diatur oleh rangkaian tanda, peranan, dan ritual, yang saling berhubungan berupa aturan simbolis. Internalisasi aturan simbolis tersebut dilakukan melalui Bahasa.<sup>28</sup>

Pemikiran feminisme postmodern adalah tentang kebebasan dan identitas. Perspektif kebebasan menurut feminisme postmodern adalah adanya pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda

---

<sup>28</sup>Rira, *Kritik atas beberapa Aliran Feminisme* <http://kkcynet.wordpress.com/kritik-atas-beberapa-aliran-feminisme> di akses pada 19 Maret 2021



dan sebenarnya perempuan tidak menginginkan hak untuk menjadi sama dengan laki-laki karena yang diinginkan sebenarnya adalah hak untuk bebas mengonstruksi diri sendiri seperti yang dimiliki laki-laki. Artinya tidak ada kelompok yang menentukan identitas bagi yang lain atau perempuan tidak didefinisikan oleh laki-laki melainkan oleh dirinya sendiri. Subjektivitas dan identitas adalah dinamis dan karena itu perempuan kemudian berhak mempertanyakan dan mengonstruksi identitas dirinya sebagai manusia yang bebas.<sup>29</sup> Feminisme postmodern memiliki fokus tinggi dalam menggaungkan pluralisme dan mendekonstruksi teks terkait relasi perempuan dan laki-laki di tengah masyarakat.

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. keduanya tidak dapat dipisahkan karena tergantung pada yang lain dan sebaliknya. setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pada umumnya peran laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup> kaum perempuan sifat dasarnya memang

---

<sup>29</sup>Riant Nugroho, *Gender dan Strategi* Hal. 83.

<sup>30</sup> Rabina Yunus, *Analisis Gender terhadap Fenomena Sosial*, (Makassar: Humanities Genius, 2022) hlm. 15.

dimaksudkan untuk menjadi sosok yang lembut, halus, penuh kehangatan, simpatik, ibu bagi anak-anaknya. semua ini mempengaruhi perempuan hingga ke tingkat yang luas secara tidak sadar. Pada penelitian ini, yang menjadi fokus adalah peran perempuan khususnya *Anrongta* sebagai identitas politik perempuan dalam masyarakat adat Kajang.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan pemikiran penulis dalam melakukan penelitian mengenai Identitas politik perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang. Penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dan pembanding dalam proses penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan disini adalah penelitian yang terkait dengan Identitas Politik, Politik perempuan, dan masyarakat adat Kajang. Penelitian terdahulu yang dijadikan landasan yaitu:

Gustiana Anwar Kambo<sup>31</sup> yang berjudul Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Kedua hal itu mendasari penguatan identitas perempuan yang

---

<sup>31</sup> Gustiana Anwar Kambo, *Penguatan Identitas Perempuan dalam pemilihan kepala daerah*, (The Politcs: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017)

dibangun oleh Indah Putri Indriani untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Walaupun terdapat keseimbangan dalam keikutsertaan perempuan dalam kontestasi tersebut, namun masih terdapat penafsiran yang menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena secara historis Luwu Utara tidak pernah di pimpin oleh Perempuan, sekaligus menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin masyarakat yang heterogen di Luwu Utara.

Rizky Bangun Wibisono<sup>32</sup> yang berjudul *Pencapaian Identitas Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Kurun Waktu 2009-2017 Studi tentang RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Budaya patriarkal merupakan budaya yang sangat mengajakar dan melembaga, budaya ini berusaha mendominasi dunia dan mengeluarkan posisi perempuan. Usaha pendobrakan patriarkal harus dilakukan dengan mendobrak sistem politik yang bekerja di dalamnya. Persoalan politik dan perempuan merupakan sebuah upaya pencapaian identitas perempuan sebagai political being sebuah identitas yang secara alamiah dimiliki oleh perempuan namun tidak dimilikinya ataupun dikenalnya. Permasalahan politik tidak hanya mengenai hak pilih semata ataupun keberadaan

---

<sup>32</sup> Rizki Bangun Wibisono, *Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia dalam Kurun Waktu 2009-2017: studi tentang rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender*, (Jurnal: Universitas Airlangga, 2019)

perempuan dalam badan legislative melainkan turut menyeret ruang privat dan identitas perempuan dan status kewarganegaraannya. Salah satu upaya untuk mencapai identitas politik perempuan adalah pemberian ruang kepada representasi perempuan dalam parlemen. Kehadiran perempuan diharapkan mampu untuk membawa kepentingan perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu munculah usulan tentang Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dianggap merupakan usulan yang benar-benar berasal dari perempuan dan nantinya digunakan untuk kepentingan perempuan. Namun Dalam Perjalanannya dibutuhkan segala upaya baik dari upaya formal kelembagaan atau non-formal melalui upaya gerakan perempuan untuk mencapai identitas politik perempuan. Dalam sistem politik yang secara umum yang seperti ini, sangat dirasa perlu sebuah sistem politik yang rigid diperlukan sebuah sistem politik yang mampu mengakomodir perempuan ke dalamnya dan menuju pada konsep keadilan dan kebaikan bersama sesuai dengan esensi sebenarnya dari politik.

Adiyana Slamet<sup>33</sup> yang berjudul *Identitas Politik dalam Komunikasi Politik Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2018*. Penelitian ini membahas tentang penggunaan politik identitas dalam Komunikasi politik calon Gubernur Jawa Barat 2018, dijadikan salah

---

<sup>33</sup> Adiyana Selamet, *Identitas Politik dalam Komunikasi Politik Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2018* (Jurnal: Universitas Komputer Indonesia, 2018)

satu faktor penting dalam merebut hati pemilih. Tiga dari empat calon Gubernur dan Wakilnya, berkontestasi dengan memunculkan identitas politik kedaerahan, Sunda, dan satu kandidat, lebih memunculkan identitas politik Agama, dalam hal ini Islam. Empat pasang bakal kandidat yang maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tersebut antara lain: Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, Sudrajat, dan Tubagus Hasanuddin. Para kandidat perlu meyakinkan hati pemilih di 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, dengan jumlah daftar pemilih tetap 32.809.057 suara. Sebagaimana yang tertuang dalam visi misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan retorika Kampanye, identitas budaya sunda sebagai symbol politik pakaian menjadi kuat, ini tercermin pada saat pelaksanaan debat pertama yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Barat Pada 27 Juni 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penggunaan identitas politik dalam komunikasi politik calon Gubernur Jawa Barat. Ada beberapa temuan, antara lain pertama, pentingnya identitas politik untuk meyakinkan pemilih dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018, kedua, identitas politik yang digunakan melalui simbol-simbol politik dengan retorika verbal dalam menghadapi konstituen baik secara langsung maupun di media lama maupun baru, ketiga penggunaan identitas politik melalui simbol *non verbal*, seperti baju dan ikat kepala yang kemudian menjadi kehasan dari calon, dan ke empat,

identitas politik dilakukan dengan memunculkan simbol-simbol agama, seperti yang digunakan oleh pasangan Asyik dan Pasangan Deddy Mizwar.

I Gusti Made Arya Suta Wirawan dan Kadek Sintya Dewi<sup>34</sup> yang berjudul *Identitas Politik dan Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali*. Penelitian ini menjelaskan tentang Kondisi masyarakat multikultural menyebabkan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari politik identitas. Tidak hanya di daerah, politik identitas juga terjadi di ibu kota di mana dampak dari hal ini juga mempengaruhi persepsi orang-orang dari luar ibu kota tentang bagaimana seharusnya politik. Salah satu isu yang terkait dengan politik identitas yang baru-baru ini muncul dan menyebar di berbagai daerah adalah larangan bagi umat Islam untuk memilih sepasang ulama non-Muslim. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan daerah seperti Provinsi Bali di mana komunitas Muslim adalah kelompok minoritas dan secara politik tidak memiliki calon gubernur dan wakil gubernur dari antara mereka? Apakah masalah ini juga mempengaruhi komunitas Muslim dalam menentukan pilihan politik mereka dalam Pemilihan Umum Bali 2018? Apa preferensi dan persepsi komunitas Muslim di Bali dalam menentukan kriteria calon gubernur dan wakil gubernur untuk lingkaran mereka? Menjelang

---

<sup>34</sup> Wirawan dan Dewi, *Identitas Politik dan Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali*, (Jurnal: UNDIKSHA, 2018)

pemilihan gubernur 2018 di Bali, sejumlah elemen masyarakat mulai dari partai politik, organisasi massa, birokrat, akademisi, pejabat daerah dan berbagai komunitas dan organisasi sosial sedang mempersiapkan diri. Meskipun hingga kini belum ada satu pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Bali, tetapi gerakan gerilya dan konsolidasi oleh mereka yang secara definitif menyatakan diri sebagai calon gubernur sudah dimulai. Beberapa dari mereka juga mulai menyentuh beberapa minoritas, termasuk komunitas Muslim. Berdasarkan uraian di atas secara sosiologis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik identitas komunitas muslim pada Pemilu 2018 Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga mencoba untuk menggambarkan bahwa ada dinamika politik yang terjadi di kalangan komunitas Muslim di Bali, mengingat bahwa beberapa komunitas Muslim di Bali tidak hanya penduduk migran atau musiman, tetapi juga komunitas yang telah hadir sejak waktu kerajaan dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan adat istiadat dan sosial ekonomi provinsi Bali itu sendiri.

Ayu Adriyani, Partini, dan Muhammad Sulhan<sup>35</sup> yang berjudul *Negosiasi identitas masyarakat adat ammatoa terhadap sistem pendidikan modern*. Penelitian ini membahas mengenai

---

<sup>35</sup> Ayu dkk, *Negosiasi identitas masyarakat adat ammatoa terhadap sistem pendidikan modern*, (Jurnal: Universitas Gadjah Mada, 2019)

masyarakat Adat Ammatoa adalah salah satu masyarakat yang masih memegang teguh kearifan tradisional untuk memastikan agar tanah adat dan tradisi mereka tetap lestari. Masyarakat adat Ammatoa dipimpin secara adat oleh seorang Ammatoa. Ammatoa adalah sebutan untuk siapa saja yang menjabat sebagai pemimpin adat. Namun, masyarakat adat Ammatoa yang masih mewarisi tradisi lisan dari leluhur mereka harus berhadapan dengan pendidikan modern yang lebih kuat dengan tradisi tulis. Satu bangunan SD telah didirikan beberapa meter dari gerbang pembatas antara ilalang embayya dan ipantarang embayya. Masyarakat adat Ammatoa masih hidup dengan keragaman tradisi mereka. Masyarakat ilalang embayya adalah masyarakat yang masih menjalankan adat secara penuh sehingga sangat selektif terhadap kemajuan zaman, namun masyarakat di ipantarang embayyasudah lebih terbuka. Dengan keberadaan sarana pendidikan formal di desa mereka, menyebabkan masyarakat Adata Ammatoa pun harus bernegosiasi untuk memastikan agar adat dan tradisi mereka tetap lestari. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan partisipasi observasi dan life story interview untuk melihat kehidupan masyarakat adat Ammatoa secara lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana negosiasi identitas masyarakat adat Ammatoa terhadap pendidikan modern. Hasilnya, masyarakat adat Ammatoa pada dasarnya



membuka diri terhadap pendidikan modern. Keputusan mereka menjadi bagian dari strategi politik mereka agar eksistensi mereka tetap bisa diakui.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan di setiap penelitian dengan kajian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan terlihat pada tema penelitian yaitu terkait identitas politik, Identitas politik perempuan, identitas masyarakat adat dan Masyarakat adat Kajang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti melihat identitas politik perempuan dalam suku adat kajang.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berorientasi untuk menggambarkan bagaimana perempuan masyarakat adat Kajang memaksimalkan potensinya sebagai pejabat pemerintahan dalam kelembagaan adat. Bagaimana Upaya perempuan mampu mempertahankan identitas politiknya diantara pejabat pemerintahan *Ammatoa* yang Sebagian besar dijabat oleh laki-laki. Hal ini sebagai bentuk aktualisasi diri perempuan dalam membantu *Ammatoa* sebagai pemimpin masyarakat adat Kajang.

Di sisi lain ketidakadilan gender masih menjadi isu yang hangat dewasa ini. Masalah ini disebabkan oleh masih tingginya perspektif yang berkembang di masyarakat yang menganggap

bahwa peran laki-laki harus lebih dominan daripada peran perempuan. Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap berbagai hal terutama dapat dalam menghambat pembangunan nasional. Sedangkan dalam struktur pemerintahan adat *Ammatoa* sudah lebih dulu melibatkan perempuan dalam jabatan pemerintahan adat yang penting.

Dalam upaya mempertahankan eksistensi perempuan dalam pemerintahan masyarakat adat kajang dapat dilihat dari keberadaan *Anrongta* sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam menyukseskan pemerintahan dan membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang. Hal ini menggambarkan aktivitas politik perempuan mempertahankan identitasnya dalam konteks politik masyarakat adat.

Dalam struktur pemerintahan Masyarakat Adat Kajang, *Ammatoa* dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh pemangku adat yang disebut *Gallarang*, diluar dari struktur tersebut *Ammatoa* juga dibantu oleh perempuan yang disebut *Anrongta*. *Gallarang* adalah jabatan yang dijabat oleh laki-laki dan *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan saja.

Berbeda dengan *Gallarang* yang dijabat oleh laki-laki berjumlah 26 orang pejabat, *Anrongta* adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh 2 perempuan saja yaitu, masing-masing *Anrongta baku atowayya* dan *Anrongta baku alolowa*. Meskipun dalam

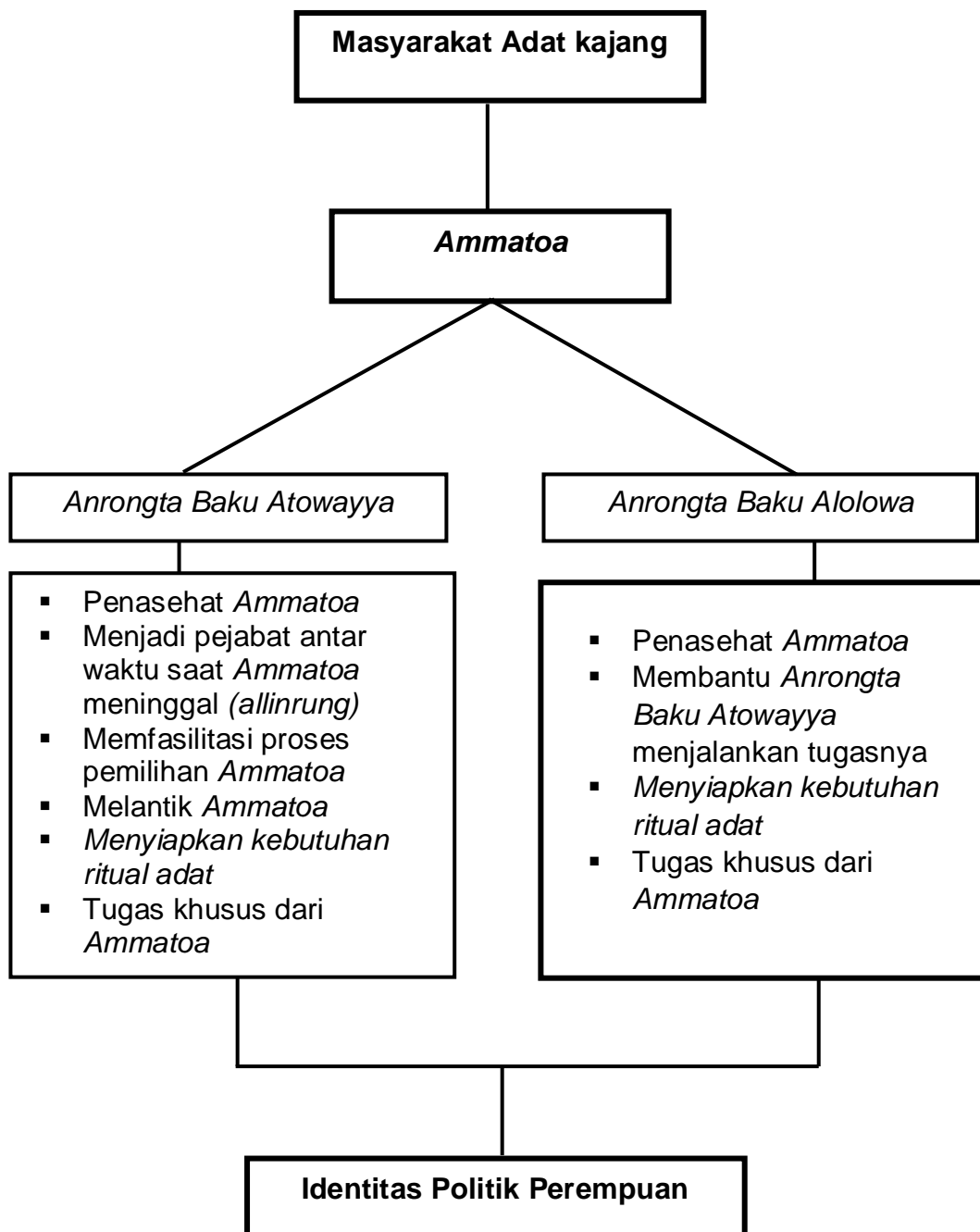
persentase jumlah yang lebih sedikit yaitu 2 orang dibandingkan dengan *Gallarang yang dijabat oleh 26 orang*, *Anrongta* adalah perempuan yang memiliki peranan penting sebagai perwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan Masyarakat adat Kajang yang menggambarkan penegasan tentang identitas perempuan sebagai penyelenggara pemerintahan masyarakat adat Kajang

*Anrongta* sebagai upaya dalam mempertahankan identitas politik perempuan dalam Masyarakat adat Kajang dilihat dari bagaimana *Anrongta* memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya membantu *Ammatoa* dalam pelaksanaan pemerintahan Masyarakat adat Kajang. upaya dalam mempertahankan identitas politik perempuan tidak dilihat dari bagaimana mereka bersaing dengan pejabat adat yang lain untuk memperebutkan kekuasaan atau menambah posisi jabatan dalam struktur kelembagaan pemerintahan adat Kajang, tetapi bagaimana *Anrongta* memaksimalkan peranan dan tanggung jawabnya sebagai perempuan dalam memimpin masyarakat adat Kajang.

*Anrongta* sebagai pejabat pemerintahan adat membantu *Ammatoa* dalam memimpin masyarakat adat Kajang. *Anrongta* memiliki tugas yaitu, memfasilitasi proses pemilihan *Ammatoa* secara alam, melantik *Ammatoa*, *Anrongta* juga menjadi pejabat antar waktu pada saat *Ammatoa Allinrung* (meninggal) sampai *Ammatoa* selanjutnya terpilih, selain itu *Anrongta* juga bertugas

mempersiapkan kebutuhan acara ritual adat yang akan dilaksanakan Masyarakat adat Kajang.

Berikut Kerangka Pemikiran dalam proses penelitian yang dilakukan, yaitu:



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti.

#### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bernaung di bawah kutub paradigma interpretivisme, subyektivisme, dan definisi sosial<sup>36</sup>. Penelitian kualitatif memiliki dasar yang bersifat deskriptif analitis dalam pengumpulan data untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif juga bersifat induktif yang berangkat dari fenomena/data yang ada, menggunakan landasan konsep/teori yang sudah ada sebagai pedoman atau bahan panduan serta penjelas untuk memfokuskan penelitian, berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti serta mengutamakan akan pentingnya proses penelitian yang berjalan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan

---

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.